

Makna Falsafah Pancasila, sejarah Kehadirannya serta Proses Perumusannya (Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan)

BAHAN AJAR MATA KULIAH PPKN
OLEH NUR MELINDA LESTARI SE.I., MH

sejarah perumusan dasar negara dan proklamasi

- Kerajaan majapahit runtuh pada permulaan abad ke XVI maka berkembanglah agama Islam di Indonesia dengan pesatnya, bersamaan dengan itu berkembang pulalah kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara. Seperti Portugis, yang diikuti oleh Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah.
- Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang yang diawali oleh portugis, namun karena semakin lama semakin berkembang Portugis menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek Penjajahan dengan dibuktikan sejak Tahun 1511 Malaka dikuasai oleh Portugis.

- Pada akhir abad ke XVI bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan. Untuk menghindarkan persaingan di antara mereka sendiri (Belanda), kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie)
- Praktek-praktek VOC semakin lama semakin jelas dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan.
- Pada abad ke XVII Belanda semakin memperkuat kedudukannya dengan didukung oleh kekuatan militer. Pada abad itu sejarah mencatat bahwa belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaannya diseluruh Indonesia. Maka rakyatpun melakukan perlawanan atas tindakan yang dilakukan Belanda. Antara lain Sultan Agung di Batavia (1613-1645), Patimura di Maluku (1817), Baharudin di Palembang (1819), Imam Bonjol di Minangkabau (1821-1837) dan masih banyak lagi. Walaupun demikian belanda terus melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia bahkan dengan lebih keras lagi yang ditandai dengan Penghisapan yang mulai memuncak ketika belanda mulai menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa (1830-1870).

Sejarah Perumusan Dasar Negara dan Proklamasi

Sejarah Perumusan Dasar Negara dan Proklamasi

- Pada abad XX politik internasional mulai terjadi pergolakan kebangkitan Dunia Timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Adapun di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa, yaitu ditandai Kebangkitan Nasional (1908) dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Boedi Oetomonya yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 inilah yang merupakan peolopor pergerakan nasional sehingga setelah itu munculah organisasi-organisasi pergerakan nasional, antara lain: Sarekat Dagang Isla (SDI) (1909), Sarikat Islam (1911), Indische Partij (1913). Partai Nasional Indonesia (PNI). Dll.
- Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diikuti Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober Tahun 1928 dengan berisikan satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air Indonesia.

Sejarah Perumusan Dasar Negara dan Proklamasi

- Setelah Nederland diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940 belanda dengan segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke Inggris, sehingga Belanda masih mampu berkomunikasi dengan pemerintahan jajahan Indonesia.
- Belanda memberikan janji kemerdekaan kelak dikemudian hari namun dalam kenyataan hanya kebohongan belaka bahkan sampai akhir pendudukan tanggal 10 maret 1940 kemerdekaan Indonesia tidak pernah terwujud.
- Bahkan kemudian fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan Propaganda “Jepang pemimpin Asia, jepang saudara tua Indonesia”. Akan tetapi dalam perang melawan sekutu Barat (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda, dll) Jepang semakin terdesak.
- Oleh karena itu agar mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia pemerintah Jepang bermurah hati dan menjanjikan kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari.

BPUPKI

- Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun kaisar Jepang beliau memberikan hadiah kepada Indonesia janji kedua pemerintah Jepang berupa “kemerdekaan tanpa syarat” janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia sebelum Jepang pada akhirnya menyerah pada sekutu.
- Dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk realisasi janji Jepang dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritu Zyanbi Tioosakai*.

Ketua (kaicoo)
Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat



Ketua Muda (Fuku Kaicoo)
Itibangase



Ketua Muda (Fuku Kaicoo)
R.P Soeroso

Enam puluh (60) anggota biasa

Susunan Kepanitiaan BPUPKI

Pelaksanaan Sidang BPUPKI	Rumusan
Sidang BPUPKI Pertama (29 Mei 1945 -1 Juni 1945)	<p>A. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peri Kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat <p>B. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori negara perseorangan 2. Paham negara kelas (class theory) 3. Paham negara Integralistik <p>C. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Pelaksanaan Sidang BPUPKI	Rumusan
Sidang BPUPKI kedua (10-16 juli 1945)	<p>Tanggal 10 Juli 1945</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. panitia kecil BPUPKI menyetujui sebulat-bulatnya rancangan preamble yang disusun panitia sembilan 2. Keputusan bentuk negara <p>Tanggal 11 Juli 1945</p> <p>Keputusan tentang luas wilayah negara baru</p> <p>Tanggal 14 Juli 1945</p> <p>Keputusan tentang susunan undang-undang dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Indonesia Merdeka, yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan belanda. b. Pembukaan yang didalamnya terkandung dasar negara Pancasila c. Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar

PPKI

- Kemenangan sekutu dalam perang dunia membawa hikmah bagi bangsa Indonesia. Menurut pengumuman Nanpoo gun (pemerintah tentara Jepang unruk seluruh daerah selatan), tanggal 7 Agustus 1945 , pada pertengahan bulan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau *Dokuritu Zyunbi linkai*
- Berbeda dengan badan penyelidik BPUPKI dalam susunan kepanitiaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak duduk seorangpun bangsa jepang, demikian pula dalam kantor tata usahanya.
- Pada tanggal 14 Agustus 1945, Ir. Soekarno mengumumkan di muka orang banyak bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin), dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

PROKLAMASI

- Setelah jepang menyerah pada sekutu, maka kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknaya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia.
- Kemudian pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di pegangsaan timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jum'at Legi jam 10 pagi WIB (Jam 11.30 waktu Jepang), Bung Karno dengan didampingi Bung hatta membacakan proklamasi dengan khidmat.

SIDANG PPKI	RUMUSAN
Tanggal 18 Agustus 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="961 239 1735 347">1. Mengesahkan Undang-undang Dasar 1945. <li data-bbox="961 354 1735 462">2. Memilih presiden dan wakil presiden <li data-bbox="961 469 1735 635">3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat
Tanggal 19 Agustus 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="961 656 1735 764">1. Tentang pembagian daerah Provinsi <li data-bbox="961 771 1735 937">2. Untuk sementara waktu kedudukan kooti dan sebagainya diteruskan seperti saat itu <li data-bbox="961 944 1735 1110">3. Untuk sementara waktu kedudukan kota dan gemeente diteruskan seperti sekarang.

Sidang PPKI

Sidang PPKI

SIDANG PPKI	RUMUSAN
SIDANG KETIGA Tanggal 20 Agustus 1945	Pembahasan terhadap agenda tentang "badan penolong Korban Perang". Adapun keputusan yang dihasilkan adalah terdiri atas delapan pasal. Salah satu dari pasal tersebut pada pasal 2 dibentuklah suatu badan yang disebut 'Badan Keamanan rakyat' (BKR)
SIDANG KEEMPAT Tanggal 22 Agustus 1945	Membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia, yang pusatnya berkedudukan di Jakarta.

PANCASILA SECARA ETIMOLOGIS

- Menurut Muhammad Yamin dalam bahasa sangsekerta pancasila mempunyai dua arti : yaitu panca yang artinya lima dan syila vokal i pendek yang artinya batu sendi, alas atau dasar dan syiila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting.
- Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa jawa diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata pancasila yang dimaksudkan adalah istilah “panca syila” dengan vokal i pendek memiliki makna “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”

Pengertian Pancasila secara Historis

- Proses perumusan pancasila diawali ketika dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritu Zyanbi Tioosakai* pertama Dr.K.R.T Radjiman Widjodiningrat, mengajukan suatu masalah. Khususnya akan dibahas pada sidang tersebut, masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, kemudian tampilah tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno
- Pada tanggal 1 juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut soekarno memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak mau disebutkan namanya
- Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya memuat isi rumusan lima prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila, Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum

PENYIMPANGAN DAN PENYELEWENGAN PENGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945

Masa kemerdekaan (1945-1949)

- Revolusi fisik
- Penyimpangan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, karena NKRI berubah menjadi RIS.
- 17 agustus 1950 negara RIS berubah kembali menjadi NKRI dengan berlakunya UUDS 50
- Pelaksanaan UUDS 50 tidak memuaskan dan stabilitas nasional tidak tercapai
- Konstituante selalu gagal dalam mengadakan sidang sehingga keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Masa Orde Lama (1959-1966)

- Penyelewengan terhadap Pancasila misalnya, pengangkatan presiden seumur hidup, pembubaran DPR oleh Presiden.
- Landasan idil Pancasila dan Landasan Struktural UUD 1945
- UUD 1945 tidak dilaksanakan secara Murni dan Konsekuensi
- Lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK belum terbentuk sesuai UUD 1945, jadi hanya bersifat sementara
- Keadaan stabilitas nasional memburuk pada puncaknya terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 september 1965, dalam situasi ini presiden Soekarno memberikan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk pemulihan keadaan dan mengembalikan stabilitas negara

Masa Orde Baru (1966-1988)

- Landasan Konstitusionalnya UUD 1945, landasan Strukturalnya kabinet Ampera, Landasan Operasionalnya TAP MPR sejak sidang Umum ke IV tahun 1966.
- Pengesahan Supersemar ke TAP. MPR No. IX/MPR/1966, Tap. MPR No. XXV/MPR/1966.
- Pelestarian UUD 1945
- Pemantapan dan pengamanan UUD 1945

Masa Reformasi

- Amandemen UUD 1945 karena UUD 1945 harus bersifat fleksibel, menyesuaikan diri dengan perkembangan bangsa Indonesia.
- Amandemen terhadap UUD 1945 karena bersifat Multiinterpretable.
- Menghapuskan sentralisasi kekuasaan baik dr masa orde lama maupun pada masa orde baru.

KONSEP DAN URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENCERDASAN KEHIDUPAN BANGSA

BAHAN AJAR MATA KULIAH PPKN



AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

- KAMPUS ADALAH TEMPAT HUNIAN ATAU PERKAMPUNGAN MASYARAKAT ILMIAH ATAU MASYARAKAT INTELEKTUAL, MAKAN HARUS MENGAMALKAN BUDAYA AKADEMIK, TIDAK TERJEBAK DALAM POLITIK PERAKTIS ATAU LEGITIMASI KEPENTINGAN PENGUASA. MASYARAKAT KAMPUS HARUS BERPEGANG PADA KOMITMEN MORAL YANG BERSUMBER PADA KETUHANAN DAN KEMANUSIAAN, BERTANGGUNGJAWAB SECARA MORAL, BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARAERAAN SERTA MENGABDI UNTUK KESEJAHTERAAN KEMANUSIAAN. KAMPUS DALAM WUJUD PERGURUAN TINGGI MENGEMBAN TUGAS DAN MISI POKOK PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI). MENURUT PP NO. 60 TAHUN 1999, PENDIDIKAN DILAKSANAKAN DI RUANG KULIAH MELALUI PENDIDIKAN INI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DIBERIKAN KEPADA PARA MAHASISWA UNTUK MENYIAPKAN, MEMBENTUK DAN MENGHASILKAN SDM YANG BERKUALITAS,



HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- **BELAJAR TENTANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) PADA DASARNYA ADALAH BELAJAR TENTANG KEINDONESIAAN, BELAJAR UNTUK MENJADI MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN INDONESIA, MEMBANGUN RASA KEBANGSAAN, DAN MENCINTAI TANAH AIR INDONESIA. OLEH KARENA ITU, SEORANG SARJANA ATAU PROFESIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI MASYARAKAT INDONESIA YANG TERDIDIK PERLU MEMAHAMI TENTANG INDONESIA, MEMILIKI KEPRIBADIAN INDONESIA, MEMILIKI RASA KEBANGSAAN INDONESIA, DAN MENCINTAI TANAH AIR INDONESIA. DENGAN DEMIKIAN, IA MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK DAN TERDIDIK (SMART AND GOOD CITIZEN) DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA YANG DEMOKRATIS.**



TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENDIDIKAN DEMOKRASI MENJADI PENTING UNTUK SEMUA SEGMENT MASYARAKAT, MULAI DARI ELIT SAMPAI RAKYAT AWAM.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YANG MEMUAT DAN MENGKAJI ISU-ISU POLITIK KEWARGAAN MULAI DARI ISU NASIONALISME KEBANGSAAN ATAU IDENTITAS NASIONAL YANG SEKARANG SUDAH SANGAT KRONIS KONDISINYA DI KALANGAN GENERASI MUDA BANGSA, ISU DEMOKRASI YANG SAMPAI SEKARANG BELUM SEPENUHNYA DITERIMA DAN DIJALANKAN SECARA BAIK, SEPERTI ISU SEPUTAR persoalan DEMOKRASI, HAM, MASYARAKAT MADANI, DAN MASYARAKAT SIPIL. DIHARAPKAN, WARGA DAPAT MEMILIKI BUDAYA KEWARGAAN(CIVIL CULTURE) YANG KEMUDIAN TEREJAWANTAH DALAM CIVILITY ATAU BERKEADABAN DALAM MASYARAKAT DAN BERNEGARA.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION) BERTUJUAN UNTUK MEMBANGUN KARAKTER (CHARACTER BUILDING) BANGSA INDONESIA AGAR MAMPU MENGEMBANGKAN DIRINYA DAN BERKEADABAN (SMART AND GOOD CITIZEN). SELAIN ITU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JUGA BERTUJUAN UNTUK MEMBENTUK KECAKAPAN PARTISIPATIF WARGA SEHINGGA DAPAT MEMPERCEPAT PROSES KEMAJUAN DAN PENINGKATAN MUTU KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



KONSEP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION) MEMPUNYAI BANYAK PENGERTIAN DAN ISTILAH. DALAM MAJALAH THE CITIZEN AND CIVIC, PAKAR PENDIDIKAN KEWARGAAN, HENRY RANDAL WAITE (1986) MERUMUSKAN PENGERTIAN CIVIC SEBAGAI THE SCIENCE OF CITIZENSHIP THE RELATION OF MAN, THE INDIVIDUAL, TO MAN IN ORGANIZED COLLECTIONS, THE INDIVIDUAL IN HIS RELATION TO THE STATE (ILMU TENTANG KEWARGANEGARAAN YANG MENGKAJI HUBUNGAN ANTAR INDIVIDU DALAM SUATU KELOMPOK YANG TERORGANISIR, SERTA INDIVIDU DENGAN NEGARA).
- MENGACU PADA KONSEPSI DI ATAS, NUMAN SUMANTRI MENDEFINISIKAN CIVIC EDUCATION SEBAGAI ILMU KEWARGANEGARAAN YANG MEMBICARAKAN, SETIDAKNYA DUA HAL: (1) HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA LAIN DALAM ORGANISASI SOSIAL EKONOMI, DAN POLITIK; (2) INDIVIDU DENGAN NEGARA.



KONSEP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- DI INDONESIA ISTILAH CIVIC EDUCATION SERINGKALI DITERJEMAHKAN DENGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ATAU PENDIDIKAN KEWARGAAN. ISTILAH PENDIDIKAN KEWARGAAN DIWAKILI OLEH AZYUMARDI AZRA DAN ICCE UIN JAKARTA. SEDANGKAN ISITLAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIWAKILI OLEH ZAMRONI, MUHAMMAD NUMAN SOMANTRI DAN UDIN S. WINAPUTRA. SEBAGIAN AHLI MENYAMAKAN CIVIC EDUCATION DENGAN PENDIDIKAN DEMOKRASI (DEMOCRAZY EDUCATION) DAN PENDIDIKAN HAM.
- BEDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 43/DIKTI/KEP/2006 TENTANG RAMBURAMBU PELAKSANAAN KELOMPOK, MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DI PERGURUAN TINGGI TERDIRI DARI ATAS MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN BAHASA INDONESIA. BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT, MAKA KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN TERSEBUT WAJIB DIBERIKAN DI SEMUA FAKULTAS DAN JURUSAN DI SELURUH PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA.



URGENSI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- MATA KULIAH INI MEMILIKI PERAN YANG STRATEGIS DALAM MEMERSIAPKAN WARGANEGARA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBANNYA, SERTA MENGENALKAN ISU POLITIK YANG TIDAK HANYA TERKAIT DENGAN HUKUM, EKONOMI, DAN BUDAYA, TETAPI JUGA BAGAIMANA HUBUNGANNYA DENGAN AGAMA. DISAMPING JUGA MEMERSIAPKAN MEREKA SEBAGAI WARGANEGARA YANG BERKARAKTER TERBUKA, MEMEGANG TEGUH NILAI-NILAI LUHUR BANGSA, CERDAS, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEADABAN. DALAM BAHASA LATIN MENGACU PADA RUMUSAN CIVIC INTERNATIONAL (1995), DISEPAKATI BAHWA PENDIDIKAN DEMOKRASI PENTING UNTUK PERTUMBUHAN CIVIC CULTURE, UNTUK KEBERHASILAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN PEMERINTAHAN DEMOKRASI



URGENSI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA

- MENGAPA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENTING DALAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL? MARILAH KITA KEMBANGKAN PERSEPSI TENTANG KARAKTERISTIK SARJANA ATAU PROFESIONAL YANG MEMILIKI KEMAMPUAN UTUH TERSEBUT DAN BAGAIMANA KONTRIBUSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SARJANA ATAU PROFESIONAL.
- DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI, PROGRAM SARJANA MERUPAKAN JENJANG PENDIDIKAN AKADEMIK BAGI LULUSAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAU SEDERAJAT SEHINGGA MAMPU MENGAMALKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MELALUI PENALARAN ILMIAH. LULUSAN PROGRAM SARJANA DIHARAPKAN AKAN MENJADI INTELEKTUAL DAN/ATAU ILMUWAN YANG BERBUDAYA, MAMPU MEMASUKI DAN/ATAU MENCiptakan LAPANGAN KERJA, SERTA MAMPU MENGEMBANGKAN DIRI MENJADI PROFESIONAL.



Konsep Identitas Nasional Bagi Bangsa Indonesia

Bahan Ajar Mata Kuliah PPKN
Oleh : Nur Melinda Lestari SE.I., MH

Pengertian Identitas Nasional

- Identitas berasal dari bahasa Inggris Identity yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain
- Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan.

Pengertian Identitas Nasional

- Dalam situasi perjuangan merebut kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pemberian rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pemberian tersebut, selanjutnya mengkristal dalam konsep ideologi kebangsaan yang biasa disebut nasionalisme, dari sanalah kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa (nation), negara (state) dan gabungan keduanya menjadi konsep negara-bangsa (nation state) sebagai komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan.

NASIONALISME

- Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa kawan dan siapa lawan.

Nasionalisme Indonesia

- Tumbuhnya paham atau paham kebangsaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik dekade pertama abad ke 20. pada waktu itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai bermunculan di kalangan pribumi. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum dikalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memformulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
- Nasionalisme yang disuarakan bukanlah nasionalisme yang berwatak sempit tiruan dari barat atau berwatak chauvinisme. Menurut Soekarno nasionalisme yang dikembangkan bersifat toleran, bercorak ketimuran, dan tidak agresif sebagaimana nasionalisme yang dikembangkan di Eropa, selain itu nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang penuh nolai-nilai kemanusiaan.

UNSUR-UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL

1. SUKU BANGSA : golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir) yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin.
2. AGAMA
3. KEBUDAYAAN : pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
4. BAHASA

KONSEP-KONSEP TURUNAN NASIONALISME INDONESIA

1. NEGARA BANGSA : menurut Pasal 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Republik merupakan bentuk pemerintahan negara kesatuan Indonesia yaitu suatu bentuk pemerintahan yang bersifat antitesis monarki dengan kepala pemerintahan bukan seorang raja dan dengan sistem pemilihan umum untuk meduduki jabatan politinya.

KONSEP-KONSEP TURUNAN NASIONALISME INDONESIA

2. WARGA NEGARA : Dalam Pasal 26 UUD 1945 dijelaskan yang disebut warga negara adalah : orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Bunyi pasal ini telah mengalami perubahan (amandemen) melalui perubahan kedua UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh MPR RI tahun 2000, yang berbunyi : “penduduk ialah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”

KONSEP-KONSEP TURUNAN NASIONALISME INDONESIA

3. DASAR NEGARA PANCASILA

- Dasar Formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea iv yang berbunyi sebagai berikut : "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
- Ketuhanan Yang Maha Esa,
- kemanusiaan yang adil dan beradab,
- persatuan Indonesia,
- dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
- serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

INTEGRASI NASIONAL

- PENYATUAN BAGIAN-BAGIAN YANG BERBEDA DARI SUATU MASYARAKAT MENJADI SUATU KESELURUHAN YANG LEBIH UTUH ATAU MEMADUKAN MASYARAKAT-MASYARAKAT KECIL YANG BANYAK JUMLAHNYA MENJADI SUATU BANGSA.
- MENURUT MAHFUD MD INTEGRASI BANGSA MERUPAKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH YANG SEMAKIN MENINGKAT UNTUK MENERAPKAN KEKUASAANNYA DI SELURUH WILAYAH.

INTEGRASI NASIONAL

BAHAN AJAR MATA KULIAH PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

OLEH : NUR MELINDA LESTARI SE.I., MH

LATAR BELAKANG INTEGRASI NASIONAL

- SEJAK PROKLAMASI KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG NEGARA INDONESIA MASIH MENGHADAPI PERSOALAN BAGAIMANA MENYATUKAN PENDUDUK INDONESIA YANG DI DALAMNYA TERDIRI DARI BERBAGAI MACAM SUKU, MEMELUK AGAMA YANG BERBEDA-BEDA, BERBAHASA DENGAN BAHASA DAERAH YANG BERANEKARAGAM, SERTA MEMILIKI KEBUDAYAAN DAERAH YANG BERBEDA SATU SAMA LAIN, UNTUK MENJADI SATU ENTITAS BARU YANG DINAMAKAN BANGSA INDONESIA. PENGALAMAN MENUNJUKKAN BAHWA DALAM PERJALANAN MEMBANGUN KEHIDUPAN BERNEGARAINI, KITA MASIH SERING DIHADAPKAN PADA KENYATAAN ADANYA KONFLIK ATAR KELOMPOK DALAM MASYARAKAT, BAIK KONFLIK YANG BERLATARBELAKANG KESUKUAN, KONFLIK ANTAR PEMELUK AGAMA, KONFLIK KARENA KESALAHPAHAMAN BUDAYA, DAN SEMACAMNYA. HAL ITU MENUNJUKKAN BAHWA PERSOALAN INTEGRASI NASIONAL INDONESIA SEJAUHINI MASIH BELUM TUNTAS PERLU TERUS DILAKUKAN PEMBINAAN. WALAUPUN HARUS JUGA DISADARI BAHWA INTEGRASI NASIONAL DALAM ARTI SEPENUHNYA TIDAK MUNGKIN DIWUJUDKAN, DAN KONFLIK DI ANTARA SESAMA WARGA BANGSA TIDAK DAPAT DIHILANGKAN SAMA SEKALI.

TERMINOLOGI INTEGRASI NASIONAL

- INTEGRASI NASIONAL ADALAH UPAYA MENYATUKAN SELURUH UNSUR SUATU BANGSA DENGAN PEMERINTAH DAN WILAYAHNYA (SAAFROEDIN BAHAR, 1998). “MENGINTEGRASIKAN” BERARTI MEMBUAT UNTUK ATAU MENYEMPURNAKAN DENGAN JALAN MENYATUKAN UNSUR-UNSUR YANG SEMULA TERPISAH-PISAH. MENURUT HOWARD WRIGINS (1996), INTEGRASI BERARTI PENYATUAN BANGSA-BANGSA YANG BERBEDA DARI SUATU MASYARAKAT MENJADI SUATU KESELURUHAN YANG LEBIH UTUH ATAU MEMADUKAN MASYARAKAT-MASYARAKAT KECIL YANG BANYAK MENJADI SATU BANGSA. JADI MENURUTNYA, INTEGRASI BANGSA DILIHATNYA SEBAGAI PERALIHAN DARI BANYAK MASYARAKAT KECIL MENJADI SATU MASYARAKAT BESAR.

TERMINOLOGI INTEGRASI NASIONAL

TENTANG INTEGRASI, MYRON WEINER (1971) MEMBERIKAN LIMA DEFINISI MENGENAI INTEGRASI, YAITU:

- a. INTEGRASI MENUNJUK PADA PROSES PENYATUAN BERBAGAI KELOMPOK BUDAYA DAN SOSIAL DALAM SATU WILAYAH DAN PROSES PEMBENTUKAN IDENTITAS NASIONAL, MEMBANGUN RASA KEBANGSAAN DENGAN CARA MENGHAPUS KESETIAAN PADA IKATAN-IKATAN YANG LEBIH SEMPIT.
- b. INTEGRASI MENUNJUK PADA MASALAH PEMBENTUKAN WEWENANG KEKUASAAN NASIONAL PUSAT DI ATAS UNIT-UNIT SOSIAL YANG LEBIH KECIL YANG BERANGGOTAKAN KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT TERTENTU.
- c. INTEGRASI MENUNJUK PADA MASALAH MENGHUBUNGKAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN YANG DIPERINTAH. MENDEKATKAN PERBEDAANPERBEDAAN MENGENAI ASPIRASI DAN NILAI PADA KELOMPOK ELIT DAN MASSA.
- d. INTEGRASI MENUNJUK PADA ADANYA KONSENSUS TERHADAP NILAI YANG MINIMUM YANG DIPERLUKAN DALAM MEMELIHARA TERTIB SOSIAL.
- e. INTEGRASI MENUNJUK PADA PENCiptaan TINGKAH LAKU YANG TERINTEGRASI DAN YANG DITERIMA DEMI MENCAPAI TUJUAN BERSAMA.

URGENSI INTEGRASI NASIONAL

- MASYARAKAT YANG TERINTEGRASI DENGAN BAIK MERUPAKAN HARAPAN BAGI SETIAP NEGARA. SEBAB INTEGRASI MASYARAKAT MERUPAKAN KONDISI YANG DIPERLUKAN BAGI NEGARA UNTUK MEMBANGUN KEJAYAAN NASIONAL DEMI MENCAPAI TUJUAN YANG DIHARAPKAN. KETIKA MASYARAKAT SUATU NEGARA SENANTIASA DIWARNAI OLEH PERTENTANGAN ATAU KONFLIK, MAKA AKAN BANYAK KERUGIAN YANG DIDERITA, BAIK KERUGIAN BERUPA FISIK MATERIIL SEPERTI KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT, MAUPUN KERUGIAN MENTAL SPIRITUAL SEPERTI PERASAAN KEKAWATIRAN, CEMAS, KETAKUTAN, BAHKAN JUGA TEKANAN MENTAL YANG BERKEPANJANGAN. DI SISI LAIN BANYAK PULA POTENSI SUMBER DAYA YANG DIMILIKI OLEH NEGARA, YANG
- MESTINYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, HARUS DIKORBANKAN UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK TERSEBUT. DENGAN DEMIKIAN NEGARA YANG SENANTIASA DIWARNAI KONFLIK DI DALAMNYA AKAN SULIT UNTUK MEWUJUDKAN KEMAJUAN. INTEGRASI MASYARAKAT YANG SEPENUHNYA MEMANG SESUATU YANG TIDAK MUNGKIN DIWUJUDKAN, KARENA SETIAP MASYARAKAT DI SAMPING MEMBAWAHKAN POTENSI INTEGRASI JUGA MENYIMPAN POTENSI KONFLIK ATAU PERTENTANGAN. PERSAMAAN KEPENTINGAN, KEBUTUHAN UNTUK BEKERJASAMA, SERTA KONSENSUS TENTANG NILAI-NILAI TERTENTU DALAM MASYARAKAT, MERUPAN POTENSI YANG MENGINTEGRASIKAN. SEBALIKNYA PERBEDAAN-PERBEDAAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT SEPERTI PERBEDAAN SUKU, PERBEDAAN AGAMA, PERBEDAAN BUDAYA, DAN PERBEDAAN KEPENTINGAN ADALAH MENYIMPAN POTENSI KONFLIK, TERLEBIH APABILA PERBEDAAN-PERBEDAAN ITU TIDAK DIKELOLA DAN DISIKAPI DENGAN CARA DAN SIKAP YANG TEPAT. NAMUN APAPUN KONDISINYA INTEGRASI MASYARAKAT MERUPAKAN SESUATU YANG SANGAN DIBUTUHKAN UNTUK MEMBANGUN KEJAYAAN BANGSA DAN NEGARA, DAN OLEH KARENA ITU PERLU SENANTIASA DIUPAYAKAN. KEGAGALAN DALAM MEWUJUDKAN INTEGRASI MASYARAKAT BERARTI KEGAGALAN UNTUK MEMBANGUN KEJAYAAN NASIONAL, BAHKAN DAPAT MENGANCAM KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA YANG BERSANGKUTAN.
- SEJARAH INDONESIA ADALAH SEJARAH YANG MERUPAKAN PROSES DARI BERSATUNYA SUKU-SUKU BANGSA MENJADI SEBUAH BANGSA. ADA SEMACAM PROSES KONVERGENSI, BAIK YANG DISENGAJA ATAU TAK DISENGAJA, KE ARAH MENYATUNYA SUKU-SUKU TERSEBUT MENJADI SATU KESATUAN NEGARA DAN BANGSA.(SUMARTANA DKK, 2001:100).

ANCAMAN DAN TANTANGAN INTEGRASI NASIONAL INDONESIA

MENURUT PIERRE L. VAN DEN BERGHE MASYARAKAT MAJEMUK MEMILIKI KARAKTERISTIK (NASIKUN, 1993: 33):

- a. TERJADINYA SEGMENTASI KE DALAM BENTUK KELOMPOK-KELOMPOK YANG SERINGKALI MEMILIKI SUB-KEBUDAYAAN YANG BERBEDA SATU SAMA LAIN;
- b. MEMILIKI STRUKTUR SOSIAL YANG TERBAGI-BAGI KE DALAM LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERSIFAT NON-KOMPLEMENTER
- c. KURANG MENGEMBANGKAN KONSENSUS DI ANTARA PARA ANGGOTANYA TERHADAP NILAI-NILAI YANG BERSIFAT DASAR;
- d. SECARA RELATIF SERINGKALI MENGALAMI KONFLIK DI ANTARA KELOMPOK YANG SATU DENGAN KELOMPOK YANG LAIN; e. SECARA RELATIF INTEGRASI SOSIAL TUMBUH DI ATAS PAKSAAN (COERCION) DAN SALING KETERGANTUNGAN DALAM BIDANG EKONOMI;
- e. ADANYA DOMINASI POLITIK OLEH SUATU KELOMPOK ATAS KELOMPOK-KELOMPOK YANG LAIN. WALAUPUN KARAKTERISTIK MASYARAKAT MAJEMUK SEBAGAIMANA DIKEMUKAKAN OLEH PIERRE L. VAN DEN BERGHE SEBAGAIMANA DI ATAS TIDAK SEPENUHNYA MEWAKILI KENYATAAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT INDONESIA, AKAN TETAPI PENDAPAT TERSEBUT SETIDAK-TIDAKNYA DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN BERFIKIR DALAM MENGANALISIS KEADAAN MASYARAKAT INDONESIA. STRUKTUR MASYARAKAT INDONESIA DITANDAI OLEH DUA CIRINYA YANG UNIK. SECARA HORIZONTAL MASYARAKAT INDONESIA DITANDAI OLEH KENYATAAN ADANYA KESATUAN-KESATUAN SOSIAL BERDASARKAN PERBEDAAN-PERBEDAAN SUKU BANGSA
- PERBEDAAN AGAMA, ADAT, SERTA PERBEDAAN-PERBEDAAN KEDAERAHAN. SECARA VERTIKAL STRUKTUR MASYARAKAT INDONESIA DITANDAI OLEH ADANYA PERBEDAAN-PERBEDAAN VERTIKAL ANTARA LAPISAN ATAS DAN LAPISAN BAWAH YANG CUKUP TAJAM. (NASIKUN, 1993: 28).

STRATEGI INTEGRASI NASIONAL

- DALAM RANGKA MENGUPAYAKAN TERWUJUDNYA INTEGRASI NASIONAL YANG MANTAP ADA BEBERAPA STRATEGI YANG MUNGKIN DITEMPUH, YAITU:
 1. STRATEGI ASILMILASI
 2. STRATEGI AKULTURASI
 3. STRATEGI PLURALIS KETIGA STRATEGI TERSEBUT TERKAIT DENGAN SEBERAPA JAUH PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS UNSUR-UNSUR PERBEDAAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT.

STRATEGI INTEGRASE NASIONAL

1. STRATEGI ASIMILASI

- ASIMILASI ADALAH PROSES PERCAMPURAN DUA MACAM KEBUDAYAAN ATAU LEBIH MENJADI SATU KEBUDAYAAN YANG BARU, DI MANA DENGAN PERCAMPURAN TERSEBUT MAKA MASING-MASING UNSUR BUDAYA MELEBUR MENJADI SATU SEHINGGA DALAM KEBUDAYAAN YANG BARU ITU TIDAK TAMPAK LAGI IDENTITAS MASING-MASING BUDAYA PEMBENTUKNYA. KETIKA ASIMILASI INI MENJADI SEBUAH STRATEGI INTEGRASI NASIONAL, BERARTI BAHWA NEGARA MENGINTEGRASIKAN
- MASYARAKATNYA DENGAN MENGUPAYAKAN AGAR UNSUR-UNSUR BUDAYA YANG ADA DALAM NEGARA ITU BENAR-BENAR MELEBUR MENJADI SATU DAN TIDAK LAGI MENAMPAKKAN IDENTITAS BUDAYA KELOMPOK ATAU BUDAYA LOKAL. DENGAN STRATEGI YANG DEMIKIAN TAMPAK BAHWA UPAYA MEWUJUDKAN INTEGRASI NASIONAL DILAKUKAN TANPA MENGHARGAI UNSUR-UNSUR BUDAYA KELOMPOK ATAU BUDAYA LOKAL DALAM MASYARAKAT NEGARA YANG BERSANGKUTAN. DALAM KONTEKS PERUBAHAN BUDAYA, ASIMILASI MEMANG BISA SAJA TERJADI DENGAN SENDIRINYA OLEH ADANYA KONDISI TERTENTU DALAM MASYARAKAT. NAMUN BISA JUGA HAL ITU MERUPAKAN BAGIAN DARI STRATEGI PEMERINTAH NEGARA DALAM MENGINTEGRASIKAN MASYARAKATNYA, YAITU DENGAN CARA MELAKUKAN REKAYASA BUDAYA AGAR INTEGRASI NASIONAL DAPAT DIWUJUDKAN. DILIHAT DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI, APABILA UPAYA YANG DEMIKIAN ITU DILAKUKAN DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI CARA YANG KURANG DEMOKRATIS DALAM MEWUJUDKAN INTEGRASI NASIONAL.

2. STRATEGI AKULTURASI , AKULTURASI ADALAH PROSES PERCAMPURAN DUA MACAM KEBUDAYAAN ATAU LEBIH SEHINGGA MEMUNCULKAN KEBUDAYAAN YANG BARU, DI MANA CIRI-CIRI BUDAYA ASLI PEMBENTUKNYA MASIH TAMPAK DALAM KEBUDAYAAN BARU TERSEBUT. DENGAN DEMIKIAN BERARTI BAHWA KEBUDAYAAN BARU YANG TERBENTUK TIDAK “MELUMAT” SEMUA UNSUR BUDAYA PEMBENTUKNYA. APABILA AKULTURASI INI MENJADI STRATEGI INTEGRASI YANG DITERAPKAN OLEH PEMERINTAH SUATU NEGARA, BERARTI BAHWA NEGARA MENGINTEGRASIKAN MASYARAKATNYA DENGAN MENGUPAYAKAN ADANYA IDENTITAS BUDAYA BERSAMA NAMUN TIDAK MENGHILANGKAN SELURUH UNSUR BUDAYA KELOMPOK ATAU BUDAYA LOKAL. DENGAN STRATEGI YANG DEMIKIAN TAMPAK BAHWA UPAYA MEWUJUDKAN INTEGRASI NASIONAL DILAKUKAN DENGAN TETAP MENGHARGAI UNSUR-UNSUR BUDAYA KELOMPOK ATAU BUDAYA LOKAL, WALAUPUN PENGHARGAAN TERSEBUT DALAM KADAR YANG TIDAK TERLALU BESAR. SEBAGAIMANA ASIMILASI, PROSES AKULTURASI JUGA BISA TERJADI DENGAN SENDIRINYA TANPA SENGAJA DIKENDALIKAN OLEH NEGARA. NAMUN BISA JUGA AKULTURASI MENJADI BAGIAN DARI STRATEGI PEMERINTAH NEGARA DALAM MENGINTEGRASIKAN MASYARAKATNYA. DIHATI DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI, STRATEGI INTEGRASI NASIONAL MELALUI UPAYA AKULTURASI DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI CARA YANG CUKUP DEMOKRATIS DALAM MEWUJUDKAN INTEGRASI NASIONAL, KARENA MASIH MENUNJUKKAN PENGHARGAAN TERHADAP UNSUR-UNSUR BUDAYA KELOMPOK ATAU BUDAYA LOKAL

STRATEGI INTEGRASI NASIONAL

3. STRATEGI PLURALIS

PAHAM PLURALIS MERUPAKAN PAHAM YANG MENGHARGAI TERDAPATNYA PERBEDAAN DALAM MASYARAKAT. PAHAM PLURALIS PADA PRINSIPNYA MEWUJUDKAN INTEGRASI NASIONAL DENGAN MEMBERI KESEMPATAN PADA SEGALA UNSUR PERBEDAAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT UNTUK HIDUP DAN BERKEMBANG. INI BERARTI BAHWA DENGAN STRATEGI PLURALIS, DALAM MEWUJUDKAN INTEGRASI NASIONAL NEGARA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA SEMUA UNSUR KERAGAMAN DALAM NEGARA, BAIK SUKU, AGAMA, BUDAYA DAERAH, DAN PERBEDAAN-PERBEDAAN LAINNYA UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG, SERTA HIDUP BERDAMPINGAN SECARA DAMAI. JADI INTEGRASI NASIONAL DIWUJUDKAN DENGAN TETAP MENGHARGAI TERDAPATNYA PERBEDAAN-PERBEDAAN DALAM MASYARAKAT. HAL INI SEJALAN DENGAN PANDANGAN MULTIKULTURALISME, BAHWA SETIAP UNSUR PERBEDAAN MEMILIKI NILAI DAN KEDUDUKAN YANG SAMA, SEHINGGA MASINGMASING BERHAK MENDAPATKAN KESEMPATAN UNTUK BERKEMBANG.